

BAB 1

PENDAHULUAN

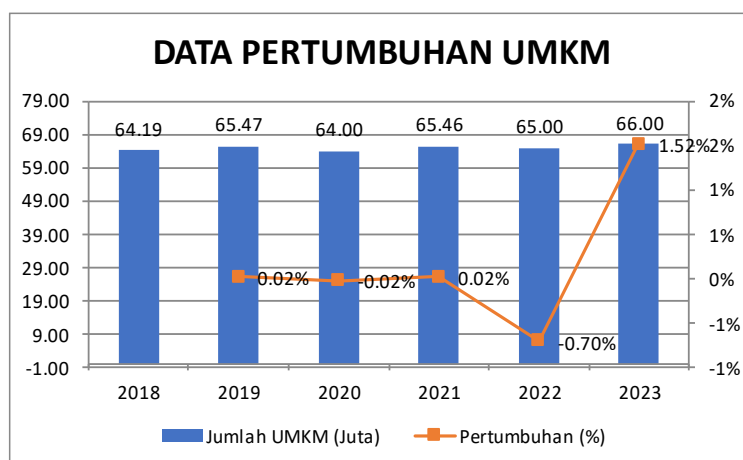
1.1 Latar Belakang

Revolusi Industri 5.0 mengubah cara UMKM beroperasi dengan menekankan kolaborasi manusia dan teknologi untuk menciptakan solusi personal, berfokus pada kesejahteraan sosial, dan mendukung kinerja berkelanjutan. UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian nasional dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata (Huda 2023). Selain menjadi pilar ekonomi lokal, UMKM juga berkontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengembangan inovasi. Dengan adanya perubahan dalam dinamika pasar dan kemajuan teknologi, UMKM diharapkan dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang yang ada untuk tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Yolanda 2024).

Di Indonesia, UMKM berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjadi salah satu pendorong utama pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sektor ini berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja dan menunjukkan ketahanan terhadap tantangan ekonomi (Yolanda 2024). UMKM juga memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di seluruh negeri. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 66 juta pelaku UMKM tersebar di berbagai sektor, memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau sekitar Rp9.580 triliun. Selain itu, sektor UMKM juga merupakan penyerap

tenaga kerja terbesar di Indonesia, mempekerjakan sekitar 117 juta orang atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, UMKM berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Kadin Indonesia 2024).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, menekankan pentingnya penguatan UMKM untuk memperluas inklusi ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan peluang kerja. Pendekatan ini sejalan dengan upaya global untuk mencapai keberlanjutan ekonomi dan sosial (Yolanda 2024). Meskipun demikian, ketimpangan ekonomi, seperti distribusi kekayaan yang tidak merata dan terbatasnya akses terhadap sumber daya, tetap menjadi tantangan utama yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dengan mengandalkan UMKM sebagai pilar utama guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Yolanda 2024).



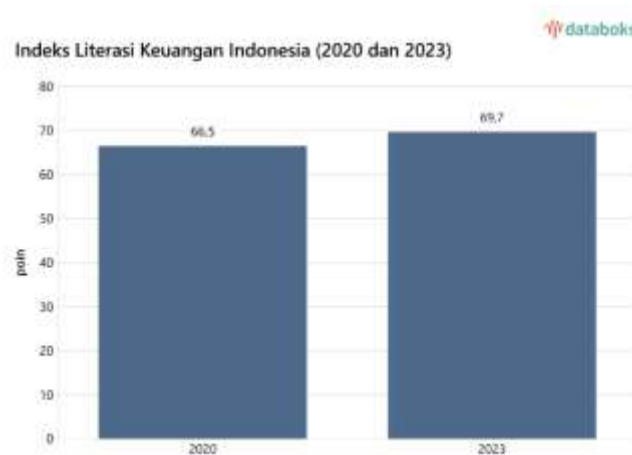
Gambar 1. 1 Data Pertumbuhan UMKM di Indonesia
Sumber: Kadin Indonesia (2024)

Pertumbuhan UMKM di Indonesia yang fluktuatif menunjukkan adanya tantangan berkelanjutan yang memerlukan sinergi semua pemangku kepentingan. Tantangan ini mencakup inovasi teknologi, literasi digital, peningkatan produktivitas, perizinan, akses pembiayaan, branding, pengembangan SDM, serta standardisasi dan sertifikasi (Kadin Indonesia 2024). Guna memastikan UMKM tetap berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penting bagi sektor ini untuk mengadopsi teknologi, meningkatkan literasi keuangan, dan terus berinovasi guna menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif dan inklusif (Tan dan Syahwildan 2022). Pemerintah berupaya untuk memajukan ekonomi kreatif dan mendukung UMKM guna memperkuat daya saing di pasar global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut juga berperan dalam mendorong kinerja berkelanjutan UMKM (Kadin Indonesia 2024).

Kinerja berkelanjutan UMKM merujuk pada kemampuan UMKM untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja usaha dalam jangka panjang, yang tidak hanya bermanfaat bagi UMKM itu sendiri, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat, lingkungan sekitar, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif dan sehat (Latifah dan Soewarno 2023). Dalam mendukung kinerja berkelanjutan ini, faktor-faktor seperti: pengelolaan keuangan yang baik, pengambilan keputusan investasi yang tepat, dan akses ke layanan keuangan formal sangat penting, karena dapat meningkatkan laba, menekan biaya operasional, dan mempertahankan usaha (Ye dan Kulathunga 2019). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang kurang memiliki pengetahuan yang memadai, sehingga belum

memiliki orientasi jangka panjang dalam menjalankan usaha mereka. Akibatnya, upaya peningkatan kinerja berkelanjutan UMKM sering kali masih dilakukan dengan cara konvensional (Gita Mai Rani 2024).

Seiring perkembangan Revolusi Industri 5.0, yang mengutamakan kolaborasi antara manusia dan teknologi, *financial literacy* menjadi salah satu faktor penting bagi pertumbuhan UMKM. *Financial literacy* dapat meningkatkan kualitas SDM dengan membantu pengelolaan finansial dan pemanfaatan teknologi finansial (Bunga 2022).



Gambar 1. 2 Indeks Literasi Keuangan Indonesia (2020 dan 2023)
Sumber: Databoks (2023)

Riset Katadata *Insight Center* (KIC) pada 2023 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 69,7 poin dari skala 0–100, meningkat dari 66,5 poin pada 2020. Penilaian terdiri atas tiga komponen: perilaku keuangan (34,3 dari 45 poin), pengetahuan keuangan (23,3 dari 35 poin), dan sikap keuangan (12,1 dari 20 poin). Data ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pengelolaan keuangan, yang berkontribusi pada penguatan literasi keuangan nasional dan pengambilan keputusan finansial yang lebih baik (Erlina 2023).

Tingkat *financial literacy* yang tinggi mendukung kinerja berkelanjutan usaha dengan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih bijak dalam anggaran, investasi, dan pinjaman. Hal ini mendukung efisiensi operasional, mengurangi risiko keuangan, dan memastikan daya saing usaha dalam jangka panjang (Bunga 2022). Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Hamid (2023), Ramdhani (2022), Sari (2022), dan Maulana (2022) menyimpulkan bahwa *financial literacy* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja berkelanjutan UMKM. Hal ini disebabkan karena *financial literacy* membantu pelaku usaha dalam mengelola keuangan, mengambil keputusan investasi yang tepat, serta mengakses layanan keuangan, sehingga membantu UMKM untuk merencanakan strategi, mengoptimalkan penggunaan dana, mengurangi risiko, dan berkembang secara berkelanjutan (Maulana 2022).

Sebaliknya, hasil riset tersebut berbeda dengan temuan oleh Husnia (2024), Gita Mai Rani (2024), kisin (2024) dan Huda et al. (2023) yang menemukan bahwa *financial literacy* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja berkelanjutan UMKM. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat pemilik UMKM dalam memanfaatkan pengetahuan keuangan dasar, sehingga mereka belum menyadari bahwa *financial literacy* sebenarnya memberikan manfaat melalui berbagai instrumen keuangan. Selain itu, pemahaman pelaku UMKM terhadap manajemen keuangan dan evaluasi berkala kinerja masih terbatas, serta kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran harian masih jarang dilakukan (Gita Mai Rani 2024).

Sejalan dengan pentingnya *financial literacy*, akses keuangan digital juga menjadi faktor krusial bagi pelaku UMKM dalam menghadapi era Revolusi Industri 5.0. Perubahan besar dalam dunia bisnis menuntut UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi agar tetap relevan dan kompetitif. Transformasi digital ini didukung oleh pemerintah melalui program digitalisasi UMKM dengan target 8 juta UMKM untuk *go-digital*. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi UMKM dalam mengakses layanan keuangan digital, mempercepat proses transaksi, dan memperluas jaringan pasar melalui platform daring (Kussujaniatun 2022;22). Dengan menciptakan ide baru, produk unik, dan layanan yang berbeda, UMKM dapat membedakan diri dari kompetitor dan menarik minat pasar (Malihah 2023).



Gambar 1. 3 Jumlah UMKM yang tergabung dalam Ekosistem Digital di Indonesia
Sumber: Kadin Indonesia (2024)

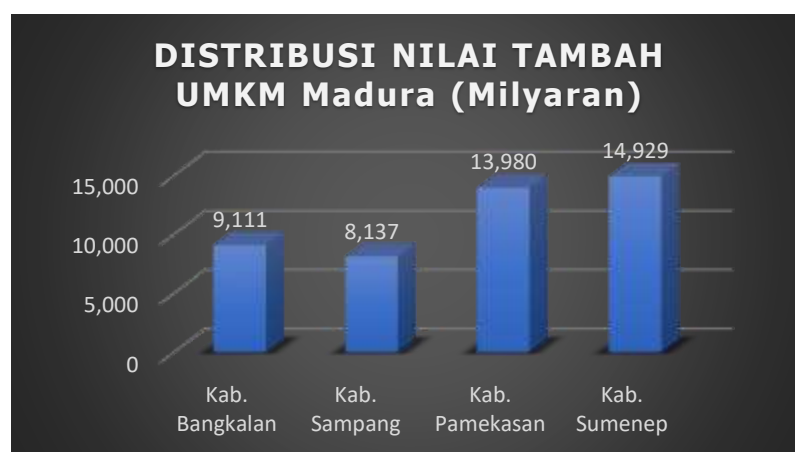
Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah UMKM yang terintegrasi dalam ekosistem digital, pemerintah bersama Kadin aktif mendorong transisi UMKM ke dalam ekosistem digital untuk memperkuat ekonomi inklusif dan memastikan sektor ini terus berkembang tanpa tertinggal (Kadin Indonesia 2024). Ekosistem digital juga mempermudah transaksi digital melalui berbagai metode *digital payment*, seperti: *transfer bank*, dompet digital, dan *QR code*, yang dapat

meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pembayaran (Musadad et al. 2023). Dengan kemudahan tersebut, penggunaan *digital payment* diharapkan dapat meningkatkan kinerja berkelanjutan usaha, meningkatkan kepuasan konsumen, serta berkontribusi pada peningkatan loyalitas dan niat pembelian (Husnia et al. 2024).

Bank Indonesia berperan penting dalam memajukan digitalisasi melalui *digital payment* dengan mengimplementasikan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), yang bertujuan mempermudah transaksi digital dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia (Kusnandar 2024). QRIS membantu UMKM untuk mengurangi biaya operasional, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, meningkatkan keamanan transaksi, memperluas jangkauan pasar, serta mendukung adaptasi terhadap tren *digital payment* (Loo et al. 2023). Penggunaan QRIS yang berkembang pesat, dengan peningkatan transaksi 207,55% (yoy) dan lebih dari 51 juta pengguna, berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Hal ini mendorong efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekosistem digital, sekaligus meningkatkan kinerja berkelanjutan UMKM melalui transformasi digital dan penguatan daya saing (Rahmadhani 2024).

Riset oleh Gita Mai Rani (2024), Kusnandar et al. (2024), Annisa et al. (2024), dan Umniyah (2023) menunjukkan bahwa *digital payment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja berkelanjutan UMKM. Namun, tantangan dalam adopsi QRIS, seperti: kurangnya informasi, kendala biaya, dan keterbatasan di daerah pedesaan, masih menghambat dampaknya pada kinerja berkelanjutan UMKM, sejalan dengan studi oleh Husnia (2024), Safitri et al. (2023) dan Tadius (2021).

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, jumlah UMKM di tahun 2023 tercatat mencapai 9,86 juta unit, yang terdiri dari 9,81 juta unit usaha mikro, 47.000 unit usaha kecil, dan 2.000 unit usaha menengah. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 0,8% dibandingkan tahun 2022, yang tercatat sebanyak 9,78 juta unit. Peningkatan ini mencerminkan tren pertumbuhan positif di sektor UMKM Jawa Timur yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah (Desi 2024).



Gambar 1. 4 Distribusi Nilai Tambah UMKM Madura Tahun 2023
Sumber: Data Dinkop UMKM Jawa Timur (2023)

Madura, dengan empat kabupatennya, memiliki potensi yang signifikan untuk pengembangan UMKM. Jembatan Suramadu berperan penting dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di wilayah ini, dengan memberikan akses yang lebih baik ke Surabaya dan sekitarnya (Kurniawan dan Gitayuda 2021). Kabupaten Pamekasan berada di posisi kedua dalam hal kontribusi nilai tambah UMKM di Madura, meskipun masih di bawah Kabupaten Sumenep. Pembagian nilai tambah ini mencerminkan bagaimana keuntungan yang dihasilkan oleh UMKM dialokasikan untuk mendukung perkembangan usaha serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan, tercatat sekitar 195.554 UMKM di Kabupaten Pamekasan yang tersebar di 13 kecamatan, mencerminkan potensi ekonomi yang besar. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemberdayaan UMKM melalui literasi keuangan, inovasi, dan teknologi sangat penting guna mendukung kinerja berkelanjutan UMKM (Maulana 2023). Menurut Agus Kuncoro, Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Kemendes PDTT RI, menegaskan bahwa Pamekasan merupakan kabupaten yang paling maju di Pulau Madura (Diskominfo Pamekasan 2023). Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan dan penerapan teknologi *digital payment* diharapkan dapat mendorong UMKM di Kabupaten Pamekasan berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Penulis memilih Kabupaten Pamekasan sebagai objek penelitian karena urgensi terkait kinerja berkelanjutan UMKM yang perlu terus didorong melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal dan adopsi teknologi digital, seperti QRIS. Hal ini penting agar UMKM di Pamekasan dapat mengikuti perkembangan zaman seiring dengan revolusi industri 5.0 dan tidak tertinggal. Mengingat Pamekasan merupakan kabupaten dengan kontribusi nilai tambah UMKM terbesar kedua di Madura dan memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan kabupaten lain di pulau Madura, maka dibutuhkan perhatian khusus untuk mendukung pengembangan sektor UMKM di daerah ini agar tetap tumbuh dan tidak terhambat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas *financial literacy* dan *digital payment* secara terpisah, studi ini menekankan sinergi keduanya dalam memengaruhi kinerja berkelanjutan UMKM. Dengan memperhatikan *research gap*

yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *financial literacy* dan *digital payment* terhadap kinerja berkelanjutan UMKM. Temuan ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung kemajuan UMKM di wilayah tersebut, dengan judul **“Pengaruh *Financial Literacy* dan *Digital Payment* (QRIS) terhadap Kinerja Berkelanjutan UMKM Madura”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut konteks masalah sebelumnya, rumusan masalah yang menjadi fokus riset ini, adalah:

- a. Apakah *financial literacy* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja berkelanjutan UMKM Madura?
- b. Apakah *digital payment* (QRIS) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja berkelanjutan UMKM Madura?
- c. Apakah *financial literacy* dan *digital payment* (QRIS) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja berkelanjutan UMKM Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam riset ini, jika ditinjau dari rumusan masalah adalah untuk mengetahui:

- a. Pengaruh secara positif dan signifikan *financial literacy* terhadap kinerja berkelanjutan UMKM Madura.
- b. Pengaruh secara positif dan signifikan *digital payment* (QRIS) terhadap kinerja berkelanjutan UMKM Madura.

- c. Pengaruh secara positif dan signifikan *financial literacy* dan *digital payment* (QRIS) secara simultan terhadap kinerja berkelanjutan UMKM Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Jika penelitian telah mencapai tujuannya, maka keuntungan yang akan diperoleh ialah:

- a. Bagi Penulis

Hasil riset ini dapat berfungsi sebagai sarana implementasi konsep-konsep yang telah dipelajari di perkuliahan, sekaligus memperdalam pemahaman teoritis secara aplikatif.

- b. Bagi Akademisi

Riset ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi studi selanjutnya yang ingin mendalami hubungan antara *financial literacy*, *digital payment* (QRIS), dan kinerja berkelanjutan UMKM.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya *financial literacy* serta penggunaan *digital payment* (QRIS) untuk menunjang kinerja berkelanjutan usaha di era digital.

1.5 Batasan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada riset ini dibatasi pada pengaruh variabel yang di terapkan, yaitu pengaruh *financial literacy*, *digital payment* (QRIS), dan kinerja berkelanjutan UMKM di Kabupaten Pamekasan, Madura. Penelitian ini hanya melihat faktor-faktor yang ada di dalam

UMKM itu sendiri, seperti pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha. Riset ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan, Madura, dan hanya melibatkan UMKM yang sudah menggunakan QRIS. Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif guna menganalisis riset terdahulu dalam menyusun hipotesis secara logika (*logico-hypothetico*). Komponen metodologi meliputi pemilihan metode penelitian, penyusunan instrumen, serta pengumpulan data untuk memverifikasi hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2020;17).